



Penerapan Kebijakan Pembelajaran di MDTA Al – Khairat

Adilla Aisyahrani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: adillaaisyahrani1107@gmail.com

Nurul Bayani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: bayaninurul102@gmail.com

Abstract. Education is a very important issue for determining the turn of events and indications of people, and for the existence of a country. Understanding the importance of the training section as a key driver for a country's progress, public authorities consistently strive to accomplish changes in the school sector, especially those identified with teaching faculties, financing, frameworks, educational programs, This research aims to describe the Learning policies implemented by MDTA AL Khairat Tembung. However, the researchers here are more focused on discussing the learning carried out by MDTA Al Khairat, the way teachers manage the class, the innovations made so that the class is not boring, and the steps taken by MDTA to make it more advanced and developed. This research uses a qualitative method, descriptive research type. Data was obtained through observation, interviews and documentation techniques with a focus on data on the implementation of learning policies at MDTA Al Khairat. The results of the research are that the implementation of the learning system at the MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah) education level is very important in ensuring that students receive quality education that suits their needs. In implementing a learning system, several things that need to be considered are curriculum adjustments, use of effective learning methods, use of technology, and involvement of parents and the community.

Keywords: education policy, Independent learning curriculum, driving school.

Abstrak. Pendidikan adalah masalah yang sangat penting untuk menentukan pergantian peristiwa dan indikasi orang, dan untuk keberadaan suatu negara. Memahami pentingnya bagian pelatihan sebagai pendorong utama untuk kemajuan suatu negara, otoritas publik secara konsisten berusaha untuk menyelesaikan perubahan di bidang sekolah, terutama yang diidentifikasi dengan fakultas pengajaran, pembiayaan, kerangka kerja, program pendidikan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Pembelajaran yang dilaksanakan oleh MDTA AL Khairat Tembung. Namun peneliti disini lebih mengarah kepada pembahasan Pembelajaran yang dilakukan MDTA Al Khairat, Cara guru dalam mengelola kelas, Inovasi yang di lakukan agar kelas tidak membosankan, dan langkah langkah MDTA supaya lebih maju dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan berfokus pada data Penerapan Kebijakan Pembelajaran Di MDTA Al khairat. Hasil penelitian adalah Penerapan sistem pembelajaran pada tingkat pendidikan MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah) sangat penting dalam memastikan bahwa siswa-siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam mengimplementasikan sistem pembelajaran, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian kurikulum, penggunaan metode pembelajaran yang efektif, penggunaan teknologi, serta melibatkan orang tua dan masyarakat.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, kurikulum pembelajaran mandiri, sekolah mengemudi.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah masalah yang sangat penting untuk menentukan pergantian peristiwa dan indikasi orang, dan untuk keberadaan suatu negara. Memahami pentingnya bagian pelatihan sebagai pendorong utama untuk kemajuan suatu negara, otoritas publik secara konsisten berusaha untuk menyelesaikan perubahan di bidang sekolah, terutama yang diidentifikasi dengan fakultas pengajaran, pembiayaan, kerangka kerja, program pendidikan, dll.

Dalam mengawasi pengajaran, khususnya di sekolah, itu adalah pelaksanaan atas sekolah sehingga sifat pelatihan di sekolah berselera tinggi dengan menyebarkan program, dimulai dengan menyebutkan kebutuhan SDM yang benar-benar ingin menyelesaikan tugas, pengaturan pengiriman sebagai proyek kepala sekolah dan rencana pendidikan yang akan dilaksanakan di sekolah.

Sekolah adalah suatu lembaga sosial yang memiliki kapasitas mendasar dalam mendorong kepribadian siswa dalam mengubah karakter sosial melalui pembelajaran dan pembelajaran yang terkoordinasi dengan rencana pendidikan yang memuat berbagai informasi dan kualitas yang berfungsi di mata masyarakat untuk mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. keberadaan negara Indonesia. Karenanya, membuat pelatihan sekolah akan memiliki komitmen yang signifikan untuk kemajuan suatu negara dengan tujuan agar realitasnya tidak dapat diabaikan sebagai wadah untuk mengajar dan mengajar ilmu pengetahuan bagi siswa dari satu zaman ke zaman lainnya.

Dalam mempersiapkan (SDM) untuk kemajuan, persekolahan tidak hanya berpusat pada kebutuhan materi saja tetapi harus berhubungan dengan kesiapan dalam memberikan mentalitas terhadap visi dan misi pengajaran, seperti pertimbangan menyeluruh mengenai yang mulia dan moral serta etika yang terhormat. Untuk situasi ini, tingkat pelatihan dipengaruhi oleh peningkatan kerangka kerja untuk semua bagian sekolah, khususnya lingkungan belajar yang mendukung, perluasan sifat pengajaran dan penyebaran pendidik yang tidak memihak, aset pembelajaran, program pendidikan yang lebih baik, kantor dan yayasan yang memadai, dan dijunjung tinggi oleh pendekatan pemerintah (*political will*), baik fokal maupun teritorial. Selain itu, menggabungkan pendekatan kepala. Seperti yang diindikasikan oleh Zuldesiah (2021) ketua adalah orang yang berperan dalam pelaksanaan pembelajaran di pergaulan sekolah.

Di bidang pengajaran di zaman globalisasi, masalah utama untuk bidang pelatihan di negara kita adalah tidak adanya sifat sekolah di berbagai tingkatan dan jenis pelatihan. Pertemuan individu yang berbeda-beda, termasuk para ahli pelatihan, bahwa persoalan hakikat

persekolahan merupakan interaksi pengajaran sebagai salah satu sudut yang dapat menghambat penataan (SDM) sebagai modal prinsip perbaikan masyarakat di berbagai bidang. Khususnya sifat pengajaran pada tingkat pelatihan esensial, masih rendah

Sifat pelatihan pendirian sekolah sangat diperlukan karena sekolah tersebut adalah pembuat atribut pengganti negara. Menghasilkan IQ (tingkat kecerdasan), Enthusiastic Remainder (EQ), Passionate Otherworldly Remainder (ESQ). Kepala sebagai pionir yang disematkan dapat membentuk lulusan yang diinginkan oleh negara dan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kualitas pengajaran tidak hanya dilihat dari sifat alumninya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan dapat memahami kebutuhan staf pengajar, siswa, wali dan lingkungan setempat sesuai dengan norma kualitas yang berlaku.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergerak menuju kemajuan, di masa persaingan bebas semakin bebas seperti saat ini. Kepala yayasan pendidikan diperlukan untuk memiliki pilihan untuk mempertaruhkan gelar sekolah berkualitas karena pelatihan yang kualitasnya tidak dapat diterima dalam jangka panjang akan ditinggalkan oleh daerah setempat dan ditinggalkan tanpa bantuan dari orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada MDTA Al Khairat Tembung yang beralamat di Jl. Moh. Yakub Lubis, Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan waktu penelitian pada tanggal 2 Oktober 2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif melalui pengumpulan data melalui wawancara dengan salah satu narasumber sebagai instrumen. Prosedur analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik data kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis melalui proses dan makna dan lebih ditonjolkan dalam penelitian ini dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta pada lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pengertian kebijakan Pendidikan

Menurut James E. Anderson yang dikutip oleh Irfan Islamy memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Serta jika ditelaah terdapat pandangan lain yang dikemukakan oleh M. Irfan Islamy.

Yang dimana beliau memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah. Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris.

Menurut Carl W. Patton dan David S. yang dikutip oleh Riant Nugroho mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analisa kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas. Analisa kebijakan yang baik adalah analisis kebijakan yang bersifat preskriptif karena perannya memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif.

Maka dapat disimpulkan bahwa Analisis kebijakan merupakan penelitian social terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan.

Sejarah Madrasah di Indonesia

Eksistensi madrasah juga pembaruannya di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20 baik aspek fisik maupun nonfisik melalui banyak kejadian dan historiografi. Dimana beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa penting yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi misinya dan gerakan pembaharuan Islam.

Adapun pada kaitannya Muhammad qosim berkomentar dalam jurnal tadriss yaitu :

Selama menjajah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda memperlihatkan sikap preventif dan diskriminatif terhadap umat Islam di Indonesia. Misalnya, pemerintah membuat regulasi sebagaimana tertuang dalam pasal 179 (2) Konstitusi Hindia Belanda (Indische

Staatsregeling) yang melarang pelajaran yang berbau spiritualis agamis keislaman tidak diajarkan di sekolah umum milik pemerintah dengan alasan pemerintah bersikap otonom. Dalam aktualisasinya, regulasi tersebut tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Pemerintah Belanda lebih memilih keberpihakan pada agama Kristen, yaitu dengan adanya Sekolah-sekolah Kristen yang dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin dari pemerintah Hindia Belanda.

Terlacak bukti bahwa kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda menjadi pemantik reaksi umat Islam, baik secara defensif maupun progresif. Reaksi defensif tentu dilakukan oleh ulama tradisional, dengan cara menghindari semaksimal mungkin atas pengaruh politik kolonial Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Kemudian reaksi progresif dilakukan dengan adanya pertimbangan bahwa manuver dan dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modernis yang cenderung sekuleris harus dilawan dan dipacu dengan pendirian lembaga dan institusi modern berbasis keislaman.

Melalui konsepsi moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum yang bercorakkan Islam dengan beberapa otonomi khas: Pertama, Madrasah didirikan dengan alasan untuk melakukan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum, sebagaimana yang dilaksanakan di Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Kedua, pendirian sekolah bercorak umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama agar meningkatkan daya spiritualis agamis, seperti yang dilakukan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Ketiga, madrasah dengan mata pelajaran sepenuhnya agama adalah madrasah diniyah yang dikelola secara modernis, juga yang dilakukan Madrasah Sumatera Thawalib pada tahun 1919.¹² Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, secara bertahap pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara progresif dan masif oleh umat Islam di berbagai regional diseluruh Indonesia dengan berbagai inovasi dan misinya.

Kebijakan madrasah di awal kemerdekaan

Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 dimana Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya atas sejumlah penjajahan kolonialisme yang selama ini meradang diatas penderitaan seluruh rakyat Indonesia termasuk para Ulama Tradisional yang telah jauh berjuang untuk melestarikan pendidikan yang bercorakkan Islam. Dimana pendidikan saat awal kemerdekaan melakukan upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yakni dimana BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam sidangnya pada tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Aktualisasi usahanya adalah pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan planning rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru yang harus diterapkan

diseluruh pelosok negeri. kemudian rekomendasi itu juga disinggung tentang eksistensi madrasah dan pesantren, yakni madrasah dan pesantren yang pada esensinya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dalam pencerdasan rakyat biasa yang sudah mengakar dalam paradigma masyarakat kita umumnya, hendaklah demikian mendapat perhatian dan asupan moril juga finansial dari pemerintah dalam upaya membentuk program strategis yang berkualitas bagi madrasah.

Kebijakan Madrasah dibawah Departemen Agama

Adanya perlawanan ideologis politis dari sebahagian besar elite islam sebagaimana menmbulkan kecurigaan dan rasa tidak suka dari pemerintah terhadap umat islam, namun dengan adanya sebagian elite muslim yang berpandangan progresif, modern dan nasionalis 10 melakukan komunikasi yang baik terhadap pemerintah. Maka dengan adanya BP KNIP yang mengusulkan mendirikan Departemen Agama dimana pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia dilakukan secara formal Instutisional. Upaya pertama Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberi asupan dan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya administrasi dan operasional, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dimana regulasi tersebut diterangkan agar madrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sedikitnya 1/3 dari jumlah jam pelajaran yang dilaksanakan. Mata pelajaran umum dimaksud meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung untuk tingkat dasar.

Ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan alam untuk tingkat lanjutan. Tepat pada tahun 1975, tepatnya tanggal 24 Maret 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 6/1975 dan Nomor 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Latar belakang lahirnya SKB 3 Menteri bermula dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 34/1972, tanggal 18 April 1972, tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, yang sebagian isinya menyatakan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggungjawab Departemen P & K, termasuk lembaga pendidikan agama Umat Islam dan Departemen Agama berupaya agar Kepres tersebut tidak diberlakukan kepada lembaga pendidikan agama, sehingga lembaga ini tetap di bawah naungan Departemen Agama. Kuatnya penolakan sebagian umat Islam terhadap Kepres tersebut, maka hingga tahun 1974 Kepres Nomor 34/1972 tidak terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15/1974 yang isinya menginstruksikan agar Kepres Nomor 34/1972 dilaksanakan. Sebagai respon Instruksi Presiden (Inpres) di atas, Menteri Agama berinisiatif menyelenggarakan sidang Majelis

Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) yang berlangsung pada tanggal 19-24 Nopember 1974

Hasil

Kebijakan Pembelajaran yang Dilakukan di MDTA Al- khairat

Kebijakan pembelajaran mengacu pada seperangkat aturan, norma dan strategi, yang digunakan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah untuk mengatur pembelajaran. Ini mencakup metode pengajaran, penilaian dan implementasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. MDTA Al- Khairat ini menerapkan kurikulum Alwasliyah, dengan mengikuti kemenag terkait buku dan roster yang digunakan.

Di MDTA Al- Khairat pembelajaran yang digunakan dan dilakukan adalah seperti madrasah pada umumnya, yaitu dengan adanya pembelajaran di kelas, dan jika ada kelas praktek para siswa disuruh untuk memperagakan terkait teori yang diajarkan tadi, misah praktek tata cara sholat jenazah, wudhu, sholat. Dan Adapun mata pelajaran dan roster yang ada bersumber dari kemenag, meskipun sekolah menggunakan kurikulum al- wasliyah. Adapun mata pelajarannya diantaranya yaitu nahu, shorof, tarekh, bahasa arab, fiqih, dan lain sebagainya.

Penerapan Sistem Pembelajaran terkait Cara Guru dalam Mengelola Kelas

Kemampuan guru dalam mengelola kelas sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Keterampilan dalam menciptakan dan menjaga kondisi belajar yang menyenangkan dan menciptakan hukum kelas yang ditaati oleh seluruh siswa. Kemampuan ini juga meliputi kemampuan untuk memahami kebutuhan dan karakteristik

Siswa, mengembangkan hubungan yang positif dengan siswa, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Di MDTA Al-Khairat penerapan sistem pembelajaran terkait cara guru dalam mengelola kelas yaitu dengan melakukannya seperti sekolah pada umumnya, dengan melakukan absen kepada siswa, dan memberikan pembelajaran sesuai dengan roster yang ditentukan. Dengan menerapkan 3 jenis kegiatan, yaitu pemaparan materi oleh guru, melakukan praktek terkait materi yang diajarkan (bila itu butuh untuk di praktekkan), seperti sholat, wudhu, dan sesi tanya jawab atau quiz sebelum waktu jam pelajaran berakhir.

Inovasi yang Dilakukan agar pembelajaran tidak membosankan

Inovasi pembelajaran adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan baru yang diterapkandalampembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Inovasi ini mencakup pengembangan atau pembaharuan metode ajar yang dilakukan oleh guru dan sekolah agar para siswa betah dalam belajar.

Di MDTA Al- Wasliyah belum ada inovasi yang sangat menonjol, masih menerapkan metode pengajaran pada madrasah- madrasah pada umumnya. Kalau keagamaan biasanya dilakukan praktek sholat, doa-doa, surah- surah pendek. Dan selanjutnya yaitu guru berusaha untuk masuk ke dunia peserta didik agar peserta didik mampu menangkap pembelajaran yang diberikan dengan cara lemah lembut, ramah, dan mencontohkan sikap suka membantu. Dan pada kegiatan-kegiatan besar biasa di madrasah ini diadakan perlombaan perlombaan seperti lomba azan, MTQ, lomba pidato, lomba tahfiz. Dan nantinya setiap pemenang akan diberikan hadiah yang bisa membangkitkan semangat anak-anak. Inovasi lain yang sudah dilakukan madrasah al- wasliyah ini yaitu adanya ekstrakurikuler tilawah al- qur'an di masjid samping sekolah, ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan di sekolah.

Langkah- Langkah Supaya MDTA Lebih Maju atau Berkembang

Madrasah yang maju atau unggul adalah madrasah yang fokusnya peningkatan mutu dan kualitas sistem pembelajaran di sekolah, sehingga mampu menciptakan generasi yang berkualitas dan kompetitif. Dimana faktor pendukung madrasah tersebut berkembang salah satunya adalah kemampuan guru dalam mengajar yang baik, manajemen yang efektif, fasilitas yang memadai, serta adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Selain itu juga kepala madrasah bisa melakukan berbagai strategi untuk peningkatan mutu di madrasah tersebut, seperti peningkatan kualitas mengajar guru, penggunaan teknologi dalam belajar dan lain sebagainya.

Untuk lebih lebih jelasnya, adapun langkah – langkah ataupun upaya yang bisa dilakukan agar MDTA lebih maju adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kurikulum yang digunakan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan para peserta didik dan masyarakat sekitar, dan selalu melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang ada;
- 2) Mengadakan pelatihan – pelatihan bagi guru dan staff madrasah, agar mereka dapat mengikuti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- 3) Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengaplikasikan metode- metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif;
- 4) Menjalin kemitraan dengan pihak- pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, yayasan, dan perusahaan, serta orangtua, untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- 5) Menerapkan sistem evaluasi yang transparan dan obyektif, baik terhadap guru, siswa, staff madrasah, agar dapat termonitor kinerja serta tingkat keberhasilan yang dicapai;

- 6) Mengembangkan program- program ekstrakurikuler yang beraagam dan menarik, sehingga dapat meningkatkan minat dan bakat siswa diluar pelajaran akademis;
- 7) Melakukan promosi dan publikasi secara intensif tentang madrasah dan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh madrasah, agar dapat dikenal oleh masyarakat lebih luas, dan mendapat kepercayaan dari orang tua siswa.

KESIMPULAN

Penerapan sistem pembelajaran pada tingkat pendidikan MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) sangat penting dalam memastikan bahwa siswa-siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam mengimplementasikan sistem pembelajaran, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian kurikulum, penggunaan metode pembelajaran yang efektif, penggunaan teknologi, serta melibatkan orang tua dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jumhadi Muhammad dan Warijo (2018), Implementasi Penyediaan dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk Pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Medan Tahun Anggaran 2009-2011, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) JAP* Vol. 1 No.2 Desember 2013.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Polic* .Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant Dwijowijoto, n(2009), *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rohman, Arif. 2002. *Jurnal Fondasia (Akar Ideologis Problem Kebijakan Pendidikan di Indonesia)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178
- Zuldesiah, Nurhizrah Gistituati, Ahmad Subandi. (2021). Kontribusi Gaya Kepemimpinan dan Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru-guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*. 5(2), 663-671. <http://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/791/pd>